

AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI STRATEGI MENANGKAL PERANG PROXY DI INDONESIA

ACTUALIZATION OF PANCASILA AS STRATEGY TO PREVENT PROXY WAR IN INDONESIA

Siswanto¹

Pusat Penelitian Politik LIPI
(sish_jakarta@yahoo.com)

Abstrak – Artikel ini dimaksudkan untuk menyumbangkan pemikiran tentang pentingnya mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup agar bangsa Indonesia tidak semakin terjebak dalam masalah kebangsaan. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan masyarakat Indonesia dihadapkan kepada beberapa persoalan kebangsaan, misalnya konflik horisontal, krisis moral, kesenjangan ekonomi, dan ancaman disintegrasi. Semua persoalan ini berpotensi mengundang terjadinya perang proxy. Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan dan pengamatan singkat terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Artikel ini menggunakan kerangka pemikiran tiga dimensi ideologi yaitu dimensi realitas, idealis, dan fleksibilitas. Studi ini menyimpulkan bahwa aktualisasi Pancasila dapat menjawab tantangan kebangsaan di Indonesia.

Kata Kunci : Pancasila, perang proxy, Indonesia

Abstract – This article would like to contribute an idea to turn back Pancasila to a state ideology and way of life. It is important to prevent Indonesia from going into a deeper trap of nation problems. Pancasila as ideology and way of life has been abandoned by many Indonesian recently. It is not surprisingly, Indonesian faced many nation’s problems, such as horizontal conflict, moral crisis, social economic gap, and disintegration. The problems are potentially will be a proxy war in Indonesia. This article is written by using library research method and social dynamic observation. This article refers to famework of three dimension of ideology, namely, reality, ideal, and flexibility dimension. In conclusion, actualization of Pancasila can be a solution to solve the nation problems.

Keywords: Pancasila, proxy war, Indonesia

¹ Penulis adalah Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bekerja di LIPI sejak tahun 1990. Tahun 1997 menyelesaikan Magister pada Program KWA Universitas Indonesia; tahun 1997 - 1999 Kasub. Kerja sama Regional BKI-LIPI; tahun 1999 menjadi peneliti pada Bidang Perkembangan Politik Internasional P2P-LIPI; tahun 2008 menyelesaikan Program Doktorat di FIB Universitas Indonesia, tahun 2009 – 2015; Kabid. Perkembangan Eropa PSDR- LIPI, tahun 2015 – sekarang; Kabid. Diseminasi dan Hasil Penelitian P2P LIPI.

Pendahuluan

Dinamika politik Indonesia dari waktu ke waktu belum menempatkan Pancasila sungguh-sungguh sebagai satu-satunya dasar negara, pandangan hidup, sumber hukum, dan falsafah negara, melainkan diletakkan dan ditafsirkan sesuai dengan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Pada masa Orde Lama, disamping Pancasila, terdapat ajaran-ajaran lain misalnya, Marhaenisme, NASAKOM,² akibatnya Pancasila bukan satu-satunya pijakan politik dan referensi kehidupan sosial di Indonesia, melainkan disandingkan dengan berbagai ajaran lainnya.³ Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai alat kepentingan politik, sehingga Pancasila diidentikan dengan keberadaan Pemerintah Orde Baru yang oleh sebagian besar masyarakat dinilai represif dan korup. Walaupun demokrasi pada masa Orde Baru disebut Demokrasi Pancasila, implementasi dari demokrasi itu tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, sering terjadinya pelanggaran

² Marhaenisme adalah ajaran Bung Karno tentang Sosialisme ala Indonesia, dimana kaum tani miskin di Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi buruh tani belaka, tetapi juga menjadi pemilik lahan walaupun dalam ukuran kecil. Nama Marhaenisme diambil oleh Sukarno dari nama seorang petani kecil di Jawa Barat bernama Marhaen. NASAKOM adalah kependekan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Waktu itu Bung Karno untuk mencoba mengadopsi ketiga aliran politik utama yang hidup di Indonesia agar dapat hidup berdampingan dan bekerja sama.

³ Dahm, "Soekarno Yakini Pancasila dan NASAKOM Adalah Masa Depan Indonesia," 6 Juni 2016, dalam <http://www.dw.com/id/soekarno-yakin-pancasila-dan-nasakom-adalah-masa-depan-indonesia/a-19345349>, diakses pada 15 Maret 2017, hlm.1.

Hak-Hak Asasi Manusia, tidak ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Hal ini berdampak buruk kepada citra masyarakat terhadap Pancasila. Konsekuensinya, pada masa Reformasi, Pancasila secara yuridis-formal sebagai dasar negara, tetapi secara material sudah tidak menjadi inspirasi dalam kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya di Indonesia. Pancasila sudah diabaikan oleh masyarakat Indonesia karena dipandang bagian dari Orde Baru. Jadi dewasa ini eksistensi Pancasila sebagai pandangan hidup statusnya tidak jelas seperti ungkapan antara ada dan tiada.

Oleh karena itu, tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk mengembalikan Pancasila di tengah-tengah bangsa dan masyarakat Indonesia. Hal ini perlu dilakukan mengingat dalam perkembangannya dewasa ini, masyarakat Indonesia sudah terjebak pada polarisasi sosial dan politik yang tidak sehat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan Pancasila sudah mulai tergusur dan ditinggalkan. Kelompok-kelompok sosial di Indonesia sudah mengarah kepada perilaku konflik pemikiran, konflik opini, yang didasarkan pada semangat kebencian di media sosial. Jika tidak ada langkah-langkah kongkrit, hal ini bisa mengarah kepada konflik horizontal bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Aliran, dan akhirnya menuju disintegrasi bangsa Indonesia. Mendingkan hal ini sama halnya mengikhhlaskan terjadi "Balkanisasi"⁴

⁴ Balkanisasi adalah suatu analogi untuk

terjadi di Indonesia.

Signifikansi tulisan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia guna menempatkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Lebih lanjut, hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia terhindar dari ancaman disintegrasi bangsa, dengan menempatkan Pancasila sebagai perekat bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tentu saja hal ini bukan perkara mudah tetapi juga bukan perkara yang mustahil untuk dilakukan.

Permasalahan

Lingkungan strategis global, regional, dan nasional Indonesia perlu mendapat perhatian secara seksama dari pemerintah dan masyarakat. Kebangkitan Cina sebagai kekuatan global memberi pengaruh kepada dinamika politik internasional. Aksi teror *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Timur Tengah dan belahan dunia lainnya menjadi ancaman nyata. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) juga berpengaruh kepada tatanan internasional. Presiden AS ke-45 ini, kebijakannya kontroversial dan tidak mudah diprediksi.

menggambarkan kondisi kacau (chaos) yaitu perubahan kompleks dan tak terkendali di kawasan Balkan atau Eropa Tengah dan Timur yang meliputi negara Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Chekoslavia (sekarang terpisah menjadi negara Ceska dan Slavia), Hungaria, dan Polandia. Pada Akhir dekade 1980-an hingga awal 1990-an, negara-negara ini mengalami gejolak politik dan mengalami perubahan dari tatanan Sosialis Komunis menjadi Sosialis Demokrasi.

Lingkungan strategis regional Indonesia juga perlu mendapat perhatian. Konflik di Laut Cina Selatan semakin memanas, kemudian terdapat potensi konflik antara Cina dan Indonesia di perairan Natuna. Konflik ini disebabkan oleh *Nine Dash Line* (NDL) dari Cina yang tidak jelas sehingga berpeluang terjadi tumpang tindih dengan kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar perairan Natuna tersebut.⁵ Namun demikian, Cina akhirnya mengakui kedaulatan ZEE di kawasan tersebut setelah terjadi diplomasi bilateral.⁶ Hal yang lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah dukungan negara-negara Melanesia terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Jika hal ini tidak mendapat penanganan yang seksama dari pemerintah, disintegrasi bangsa menjadi taruhannya, yaitu OPM akan mendapat “angin”, berupa dukungan diplomasi,

⁵ Garis imajiner Dash Nine Line yang ditetapkan oleh Cina tidak jelas sehingga berpotensi tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif di perairan natuna. Lihat, “Tegang di Natuna, Ini Senjata Luhut yang Bikin Cina Keder”, dalam <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/21/118721073/tegang-di-natuna-ini-senjata-luhut-yang-bikin-cina-keder>, diakses pada 15 Maret 2017. Pemerintah Cina akhirnya memberikan pernyataan resmi mengakui hak penuh Indonesia atas Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial ke Cina atas Kepulauan Spratly. Oleh karena itu, pihak Cina tidak keberatan atas kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna, “Cina Akui Hak Indonesia atas Kepulauan Natuna,” dalam <https://dunia.tempo.co/read/news/2015/11/21/118720925/cina-akui-hak-indonesia-atas-kepulauan-natuna>, 21 November 2015, diakses pada 15 Maret 2017.

⁶ “Cina Akui RI di Natuna Setelah Diancam Ini oleh Menteri Luhut”, <https://dunia.tempo.co/read/news/2015/11/21/118720926/cina-akui-ri-di-natuna-setelah-diancam-ini-oleh-menteri-luhut>, 21 November 2015, diakses pada 16 Maret 2017.

dan berpotensi pada lepasnya Papua dari NKRI.

Lingkungan strategis nasional juga perlu mendapat perhatian. Euforia politik berkepanjangan dari masyarakat Indonesia, menguatnya isu hoax dan SARA di media sosial bisa memancing konflik diantara kelompok-kelompok sosial. Hal ini bisa menjurus kepada gangguan keamanan dan stabilitas nasional, bahkan persatuan Indonesia. Isu serbuan Tenaga Kerja Asing juga menimbulkan keresahan. Aksi teror oleh kelompok radikal di berbagai kawasan di Indonesia juga menjadi ancaman nyata terhadap masalah keamanan.

Secara eksternal, perkembangan isu di lingkungan global, regional, dan nasional bisa berdampak terjadinya Perang Proxy di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sangat intensnya mobilitas manusia, barang, jasa, ide (paham) di era globalisasi ini, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Perang proxy itu sendiri dibedakan kedalam tiga kategori yaitu: bidang politik/keamanan, ekonomi, dan kebudayaan. (1) Perang Proxy di bidang politik-keamanan memiliki ciri-ciri antara lain: (a). punya target politik/kekuasaan, (b) Metode perjuangan: kekerasan, semi militer; (2) Perang Proxy di bidang ekonomi memiliki ciri-ciri: (a). Punya target keuntungan materi (komersial), (b) metode perjuangan: *lobbying*, suap (KKN); (3) Perang proxy kebudayaan dan pemikiran memiliki ciri-ciri: (a) punya target ideologi, gaya hidup, dan pola pikir,

(b) Metode perjuangan : diplomasi publik, promosi seni-hiburan, diskursus publik, pengenalan budaya populer. Jadi, perang proxy tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu politik, ekonomi, sosial budaya.⁷ Sementara itu, Pancasila yang seharusnya menjadi kekuatan untuk menghadapi ancaman Perang Proxy tersebut sudah jauh dari kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat kehilangan pedoman atau pegangan menghadapi gempuran arus globalisasi tersebut yang memiliki potensi menjadi Perang Proxy. Oleh karena itu, Pancasila perlu diaktualisasi keberadaannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, guna menjawab ancaman atau tantangan akan adanya Perang Proxy tersebut. Dalam hal ini, Pancasila perlu diberi interpretasi baru yang disesuaikan dengan dinamika nasional dan global yang sedang berlangsung saat ini.

Kerangka Pemikiran

Tulisan ini terlebih dahulu meninjau eksistensi ideologi Pancasila. Seorang tokoh intelektual yang lama mengkaji pembangunan politik di Indonesia yaitu Alfian mendefinisikan ideologi sebagai sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bersama

⁷ Artanti Hendriyana, "Waspada, Proxy War Menyerang Berbagai Aspek Kehidupan di Indonesia", <http://www.unpad.ac.id/2016/03/waspada-proxy-war-menyerang-berbagai-aspek-kehidupan-di-indonesia/>, 7 Maret 2016, diakses pada 16 Maret 2017.

di suatu masyarakat.⁸ Ideologi mencerminkan tatanan nilai yang paling mendasar dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, ideologi merupakan referensi dari perkembangan nilai di Indonesia.

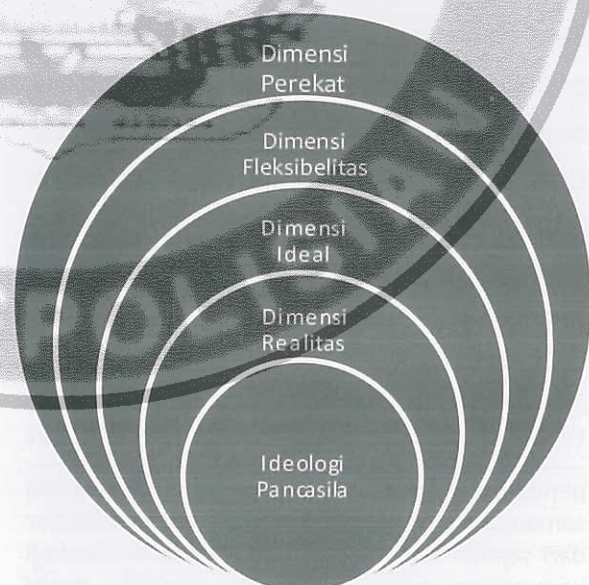
Lebih jauh Alfian merumuskan dimensi ideologi yaitu: (1) dimensi realitas, (2) dimensi idealis, (3) dimensi fleksibel.⁹ Dalam pemahaman Alfian, suatu ideologi harus memiliki ketiga dimensi tersebut. Ideologi memiliki cakupan yang komprehensif, yaitu bisa memayungi berbagai kepentingan dan dinamika sosial karena Ideologi merupakan himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, dan kepercayaan dari seseorang atau kelompok orang. Jadi ideologi merupakan referensi bagi seseorang atau kelompok dalam merespons masalah dan dalam bersikap.¹⁰

Sejarah membuktikan bahwa sejumlah negara runtuh karena mengalami krisis ideologi. Misalnya, Uni Soviet runtuh menjadi beberapa negara berdaulat, antara lain Georgia, Moldova, Belarus, Azerbaijan, Tajikistan dan lain-lain dengan Rusia sebagai pewaris utamanya. Yugoslavia terpecah-pecah menjadi sejumlah negara diantaranya Bosnia, Serbia, Slovenia. Kedua negara hancur karena ideologi negara sudah tidak sepenuhnya diminati oleh rakyatnya. Jadi, ideologi punya fungsi perekat dari berbagai komponen masyarakat yang

heterogen, sehingga ketika ideologinya sudah tidak didukung rakyat, maka sama halnya dengan perekat dari rasa kebangsaan sudah rusak yang bisa menuju kepada bubarnya sebuah negara.

Dimensi ideologi tersebut di atas, bisa dilengkapi menjadi empat dimensi, yaitu: (1) dimensi realitas, (2) dimensi idealis, (3) dimensi fleksibel, (4) dimensi perekat. Hal ini merupakan wacana untuk melengkapi tiga dimensi ideologi. Tentu saja transformasi pemikiran seperti ini bisa mengundang diskursus dan silang argumentasi. Gambaran tentang empat dimensi ideologi tersebut bisa digambarkan secara sederhana seperti di bawah ini:

Gambar 1. Empat Dimensi Ideologi



Sumber : Alfian, *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm.6. "

" Dimensi ideologi disampaikan oleh Alfian dalam bukunya *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia* yang berbicara tentang tiga dimensi ideologi. Dalam pemikiran Alfian terdapat tiga dimensi ideologi yaitu dimensi realitas, dimensi ideal, dan dimensi fleksibilitas. Dalam hal ini penulis menambahkan dimensi perekat dari tiga dimensi ideologi tersebut karena demikian

⁸ Alfian, *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 6.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.45.

Aktualisasi dimensi keempat dari ideologi menjadi penting ketika negara diambang disintegrasi. Dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, merupakan refleksi langsung dari dimensi perekat bangsa. Masyarakat perlu diberi pemahaman terencana dan sistematis tentang persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dengan tidak melalui indoktrinasi seperti yang dilakukan pada masa Orde Baru, yakni atas dasar keterbukaan dan rasionalitas. Penggali dan perumus Pancasila sudah mengantisipasi sejak awal masyarakat Indonesia yang heterogen, rentan dengan ancaman keutuhan bangsa. Seperti yang kita warisi, nilai persatuan Indonesia dijadikan sila tersendiri yang berarti keberadaannya sangat penting. Sejarah bangsa-bangsa di dunia memberi pelajaran penting bahwa eksistensi suatu negara bisa berdiri dan bisa runtuh sesuai dengan dinamika sosial dan orientasi politik warga negaranya yang tidak terlepas dari pengaruh internal maupun eksternal.

Guna mendalami lebih jauh tentang dimensi ideologi, berikut pentingnya dimensi perekat untuk mewartakan semangat persatuan Indonesia. Misalnya balajar dari sejarah bubarnya Uni Soviet ketika ideologi komunisme sudah tidak lagi memiliki posisi strategis dan melemah legitimasinya dihadapan pemerintah dan rakyatnya, maka Uni Soviet bubar dan berubah menjadi *Commonwealth of Independent State* yaitu kumpulan negara-negara yang merdeka dan berdaulat, seperti Rusia, Ukraina, Turkmenistan, Kazakstan, Tajikistan, bahkan ada negara yang sudah keluar dari CIS seperti pada tahun 2008, Georgia keluar dari CIS karena berbeda pandangan dengan Rusia. CIS adalah upaya terakhir dari elit politik Rusia untuk mempertahankan keberadaan bayang-bayang Uni Soviet, tetapi nampaknya tidak cukup berhasil.

tinjauan atas dimensi-dimensi dari Pancasila. *Pertama*, dimensi realitas, dipahami sebagai gambaran bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang tidak terpisahkan. Kebersatuan antara nilai-nilai dan masyarakat ini dianalogikan seperti dua sisi dari mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena ada saling ketergantungan satu sama lain. *Kedua*, dimensi ideal adalah gambaran tentang cita-cita yang dikandung didalam suatu ideologi. Jika kita mengarah kepada Pancasila, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan sosial ini yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Dalam nilai keadilan sosial adalah kondisi ketika nanti dikemudian hari tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia sudah mendekati merata, tetapi bukan merata seperti yang dimaksud oleh paham Komunis. Ketika nanti dikemudian hari jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin sudah menyempit. Kapan kondisi ini akan terwujud, berapa angka pertumbuhan di saat itu, dan berapa jumlah penduduk saat itu? Data dan informasi semacam ini tentu saja belum diketahui karena ini adalah kondisi ideal Indonesia dimasa depan. Kondisi sekarang Indonesia belum mencapai ke tahapan itu. Kondisi itu adalah suatu cita-cita yang diamanatkan oleh dimensi ideal dari suatu ideologi, dalam hal ini Pancasila. *Ketiga*, dimensi fleksibilitas, adalah dimensi keterbukaan atas tuntutan zaman. Pancasila sebagai

ideologi terbuka memberi ruang kepada interpretasi baru sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Mendiskusikan ideologi Pancasila tidak sah rasanya jika tidak merujuk pada sejarah perumusan ideologi tersebut yang dilakukan di awal kemerdekaan tahun 1945. Para pendiri bangsa sangat menyadari bahwa ideologi bangsa Indonesia harus merefleksi nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mereka melakukan perenungan dan pengayaan terhadap nilai-nilai kehidupan di Indonesia. Para pendiri bangsa itu antara lain Moh. Yamin, Supomo, dan Sukarno.¹² Hasil perenungan mereka disampaikan pada Sidang BPUPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menguraikan pemikirannya tentang dasar negara, yang terdiri dari:

1. Peri Kebangsaan;
2. Peri Kemanusiaan;
3. Peri Ketuhanan;
4. Peri Kerakyatan; dan
5. Kesejahteraan Rakyat.

Selanjutnya, ide dari Muhammad Yamin tentang dasar negara juga secara implisit terkandung dalam usulannya yang tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Pada alenia terakhir mukadimah

rancangan UUD itu tercantum pula rumusan lima asas dasar negara. Alenia terakhir ini kemudian disepakati sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia;
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dari fakta di atas, Yamin menyampaikan dua kali dasar negara secara langsung dan tak langsung. Dasar negara pertama disampaikan secara langsung saat menyampaikan pidato secara lisan dan dasar negara secara tidak langsung disampaikan saat menyampaikan ketika mengusulkan rancangan Undang-Undang Dasar. Keduanya hampir sama dan hanya sistematika yang berbeda. Misalnya, ketuhanan dalam pidatonya disampaikan pada sila ketiga, sedangkan yang menarik justru isi dari kandungan dasar negara kedua yang disampaikan secara tidak langsung ini yang disepakati menjadi dasar negara Indonesia, bahkan mungkin Yamin sendiri tidak menyangka akan hal ini.

Soepomo juga menyampaikan pemikirannya mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof.Dr.Mr.Soepomo tampil

¹² Mega Purnama Zainal, "Tiga Tokoh Perumus Pancasila, 22 Agustus 2016, "<http://abulyatama.ac.id/?p=5220>, diakses pada 18 Januari 2017.

berpidato dihadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya beliau menyampaikan gagasannya mengenai lima dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari:

1. Persatuan;
2. Kekeluargaan;
3. Keseimbangan lahir batin;
4. Musyawarah; dan
5. Keadilan rakyat.

Soekarno juga salah seorang yang menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya dihadapan sidang BPUPKI. Soekarno secara lisan menyampaikan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yang terdiri dari :

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan;
3. Mufakat atau Demokrasi;
4. Kesejahteraan sosial; dan
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Lima asas di atas oleh Soekarno diusulkan agar diberi nama "Pancasila". Berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara tersebut merupakan refleksi dari pemikiran para pendiri bangsa yang mencermati dari nilai-nilai yang hidup di bumi Indonesia pada masa itu. Nilai-nilai tersebut meliputi: Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; jiwa dan semangat merdeka; cinta tanah air dan bangsa;

harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka; pantang mundur dan tidak kenal menyerah; semangat persatuan dan kesatuan; semangat anti penjajah dan penjajahan.

Jika dikaji lebih dalam, nilai-nilai tersebut tidak lain adalah nilai-nilai ideal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu bersyukur dan berterima kasih kepada nenek moyangnya yang telah berhasil membangun struktur nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial dengan baik untuk kehidupan bersama. Padahal mereka hidup di bawah struktur sosial yang jauh dari rasa adil karena di bawah sistem kolonial, tetapi mereka tetap berusaha memelihara idealisme atau nilai-nilai luhurnya.

Seperti diketahui kompromi adalah jalan yang bijak ditempuh oleh para pendiri bangsa untuk merumuskan dasar negara. Substansi dasar negara diambil dari butir-butir pemikiran Yamin. Usulan ini biasa disebut Piagam Jakarta dengan sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Hanya saja tujuh suku kata dihilangkan karena ada keberatan dari anggota BPUPKI Indonesia Timur. Kesiediaan merubah Piagam Jakarta tersebut merupakan bentuk toleransi untuk suatu kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Para pendiri bangsa menghargai perbedaan pendapat; mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan golongan; menerima hasil keputusan bersama; dan

mengutamakan persatuan dan kesatuan.

Selanjutnya, Perang Proxy di berbagai kawasan di dunia merupakan pengalaman berharga yang penting dipelajari dan diambil hikmahnya. Agar bangsa Indonesia bisa mewaspadai efek dari terjadinya perang proxy karena hanya memecah-belah persatuan yang susahpayah dibangun oleh para pendiri bangsa. Perang proxy itu sendiri dimaknai sebagai perang tidak langsung, sebagai berikut:

The typical definition of the term war by proxy in the Cold War period is a war between regional states that may be regarded as a substitute for direct confrontation between the superpowers. War by proxy is the result of the invention of nuclear weapons and of the consequent need for the superpowers to avoid coming directly into conflict with each other. Generally we can identify two meanings assigned to the term war by proxy, local war with and without external military intervention.¹³

Dalam banyak kasus perang proxy terjadi pada era Perang Dingin. Perang Proxy dapat mencegah super power terlibat dalam konflik secara langsung sehingga potensi perang nuklir bisa diminimalisir. Perang Proxy diidentifikasi memiliki dua ciri yaitu perang lokal dan tidak ada intervensi kekuatan militer dari luar. Pihak pelaku utamanya hanya mengendalikan dari jarak jauh dan memberi bantuan atau dukungan baik

material maupun non-material sesuai dengan situasi yang ada. Kasus Perang Proxy di berbagai kawasan meningkat seiring dengan meningkatnya eskalasi Perang Dingin antar Uni Soviet melawan Amerika Serikat (AS) pada masa lampau.

Perang Proxy pernah terjadi di Indocina. Vietnam merupakan salah satu negara yang pernah dilanda Perang Proxy. Perang itu terjadi antara kelompok Vietkong di Vietnam Utara yang berafiliasi ke Uni Soviet melawan kelompok Ngo Dinh Diem yang berafiliasi ke AS. Perang Proxy yang dimanifestasikan dalam bentuk perang saudara ini berlangsung antara tahun 1955 - 1975. Kamboja adalah negara lain yang juga pernah punya sejarah Perang Proxy. Perang ini terjadi antara kelompok Heng Samrin yang berafiliasi ke Vietnam dan Rusia melawan kelompok Pol Pot yang berafiliasi ke Cina, AS, dan Thailand. Perang Proxy yang terjadi sulit diselesaikan sejauh pihak negara luar yang mengontrolnya tidak menunjukkan itikadnya untuk berdamai.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mengambil pelajaran dari Perang Proxy di Indocina tersebut. Jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia. Jika terjadi, hal itu sangat sulit menyelesaikannya. Perang Proxy sangat kompleks dan rumit karena menyangkut kepentingan banyak pihak baik internal maupun eksternal.

¹³ Yaacov Bar Simantov, "The Strategy of War by Proxy", *Cooperation and Conflict*, No. XIX, (New York: Middle East Institute, Columbia University and Department of International Relations), The Hebrew University of Jerusalem, 1984, hlm. 263-273.

Temuan dan Fakta-Fakta Potensi Perang Proxy di Indonesia

Pengumpulan fakta-fakta dalam penulisan artikel ini didasarkan teknik penggunaan dokumen dan pengamatan sosial. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi ini adalah buku, artikel, paper, dan informasi atau catatan lainnya, baik dalam bentuk *hardcopy* yang tersedia di Perpustakaan maupun *softcopy* yang dilelusi dari jaringan internet. Dokumen-dokumen ini menjadi rujukan dalam menguji, memberi interpretasi dan memprediksi atas berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi,¹⁴ khususnya terkait dengan Perang Proxy di Indonesia. Selanjutnya, pengumpulan data juga dilakukan melalui teknik pengamatan sosial. Teknik pengamatan memberi ini kesempatan kepada penulis untuk melakukan pencatatan berbagai peristiwa dan situasi secara lebih proporsional. Teknik pengamatan juga membuat penulis lebih mudah memahami situasi-situasi yang rumit dan perilaku yang kompleks yang melatar belakangi Perang Proxy di Indonesia.¹⁵

Berikut ini akan disampaikan perspektif sejarah yaitu fakta-fakta tentang gerakan ekstrim kiri dan kanan yang dipahami sebagai bagian dari Perang Proxy di Indonesia. Pada 1948 terjadi pemberontakan PKI/Muso. Pada saat itu bangsa Indonesia sedang sibuk menghadapi agresi Belanda kedua, dilain pihak PKI memanfaatkannya

untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan Muso ini berafiliasi kepada Partai Komunis Uni Soviet, pada masa itu. Hal ini juga mencerminkan aksi politik yang bernuansa Perang Proxy karena Uni Soviet mendukung atau mengendalikan gerakan itu. Hal ini terjadi mengingat pada masa itu, dunia dilanda Perang Dingin antara Uni Soviet melawan Amerika Serikat. Sebagai kekuatan adidaya, Uni Soviet berkepentingan, menanamkan pengaruhnya di Indonesia.

Pada awal tahun 1950-an, seorang bekas gerilyawan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara bernama Abdul Kahar Muzakkar mendirikan TII (Tentara Islam Indonesia), yang kemudian bergabung dengan Darul Islam (DI), dan di kemudian hari dikenal dengan nama DI/TII di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Aksi ini sebagai pemberontakan kepada pemerintah Indonesia dan dikategorikan sebagai aksi ekstrim kanan. Pemerintah pusat tidak tinggal diam terhadap langkah subversi ini sehingga melakukan operasi militer. Pada tanggal 3 Februari 1960, melalui Operasi Tumpas, dia dinyatakan tertembak mati dalam pertempuran antara pasukan TNI dari satuan Siliwangi 330 dan anggota pengawal Kahar Muzakkar di Lasolo, Sulawesi Tenggara. Kasus Kahar Muzakkar penulis tidak mengetahui secara pasti, apakah dia punya afiliasi dengan kekuatan di luar atau tidak?

Selanjutnya, kasus PRRI/Permesta tahun 1957 yang dipicu oleh hubungan yang tidak harmonis diantara para pemimpin-pemimpin di Jakarta dan

¹⁴ Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdikarya, 1994), hlm.160.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 126.

daerah. Sejumlah petinggi bangsa pada masa itu antara lain Simbolon, Kawilarang, Ventje Sumual, Burhanudin Harahap bersikap tidak puas terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan memutuskan untuk mendirikan pemerintah tandingan yang dikenal dengan nama PRRI dan Permesta. Sejarah mengindikasikan bahwa gerakan ini berafiliasi kepada Amerika Serikat (AS).¹⁶ Hal ini karena AS, seperti halnya Soviet, merupakan bagian dari kekuatan adidaya yang sedang menghadapi Perang Dingin, sehingga punya kepentingan untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Namun demikian, Sukarno menyampaikan kritik atas kebijakan AS yang mendukung pemberontakan tersebut.¹⁷

Pada tahun 1965, kembali terjadi aksi pemberontakan oleh PKI, kali ini dipimpin oleh Aidit. Aksi ini ditandai dengan pembunuhan sejumlah petinggi Angkatan Darat di suatu kawasan Jakarta Timur yang disebut Lubang Buaya. Mereka yang terbunuh adalah sejumlah Jendral dan perwira Angkatan Darat: Ahmad Yani, Katamso, M.T. Haryono, D.I. Pandjaitan, S. Parman, Sutoyo, Suprpto, K.S. Tubun, Tendean, Sugiono. Dari kajian sejarah peristiwa tersebut, ada indikasi aksi pemberontakan PKI ini berafiliasi kepada negara Cina yang pada masa itu juga ingin menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia

¹⁶ Siswanto, *Terobosan John F. Kennedy dalam Kemelut Irian Barat*, (Jakarta: Inti gading Prima, 2015), hlm. 76.

¹⁷ Howard Jones, *Indonesia Possible Dream*, (Singapura : Toppan Printing, Co, Ltd, 1977), hlm. 234.

yang dikenal dengan istilah Perang Pembebasan Rakyat.

Selanjutnya, disampaikan pula perspektif kontemporer tentang situasi yang mengancam Indonesia. Belakangan ini, ada fenomena yang menarik terkait dengan keberadaan kelompok ekstrim di Indonesia. Di akhir tahun 2016, masyarakat Indonesia diramaikan oleh kasus munculnya simbol-simbol Komunisme. Hal ini menimbulkan reaksi berupa kritik masyarakat yang tidak menyetujui hal itu. Penegak hukum, dalam hal ini Polisi melakukan penyitaan simbol-simbol tersebut. Di kalangan masyarakat sebenarnya terjadi perdebatan yaitu ada pihak yang berpandangan aksi penyitaan adalah langkah berlebihan karena komunisme di dunia sudah tinggal nama kecuali di Korea Utara, jadi tidak perlu menjadi kekhawatiran yang berlebihan. Aksi ini juga dipandang bagian dari pengekangan kebebasan berekspresi yang sangat dihormati di era reformasi.

Namun demikian, ada juga pihak berpandangan bahwa selama Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) No.25/1966 belum dicabut, maka pemerintah Indonesia berhak melarang segala atribut yang mencerminkan paham Komunisme. Hal ini dipandang tindakan melawan hukum dan pelakunya bisa dipidanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lagi pula jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi preseden buruk dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Masyarakat yang menentang hal itu dikhawatirkan akan mengambil

insiatif sendiri atau main hakim sendiri. Bahkan, ini bisa mengundang konflik horizontal, dimana seandainya meluas akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.

Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia menghadapi ancaman kekuatan ekstrim lain yaitu adanya aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Contoh sejak tahun 2002 sudah terjadi aksi bom Bali yang disusul oleh aksi-aksi lain seperti bom Marriot, bom di depan Kedutaan Australia, bom di gedung Sarinah, bom di depan kantor polisi di Solo, dan terakhir bom di depan sebuah gereja di Kalimantan. Mereka melakukan aksi teror dengan cara pelemparan bom dan peledakan bom bunuh diri. Para pelakunya mengklaim bahwa aksinya merupakan bagian jaringan terorisme internasional dan belakangan aksi yang mereka lakukan diklaim bagian dari gerakan ISIS di Indonesia. Dengan demikian, aksi itu bisa dikatakan bagian dari aksi Perang Proxy yang sudah masuk ke Indonesia.

Para pelaku aksi ini menjadikan targetnya adalah unsur pemerintah khususnya polisi dan simbol-simbol "Barat" khususnya AS di Indonesia. Dari sudut pandang pelaku aksi ekstrim ini, mereka berpandangan bahwa pemerintah Indonesia adalah musuh mereka karena dipandang sebagai pemeritahan Toghut (berhala), kafir, tidak adil terhadap umat Islam dan dipandang antek dari AS. Padahal AS atau "Barat" dipandang sebagai musuh Islam karena mereka juga terprovokasi oleh tesis

Samuel Huntington tentang *the Clash of Civilization* yang berasumsi bahwa pasca Perang Dingin maka sistem Bipolar yang baru adalah konflik peradaban "Barat" versus Islam. Apalagi ini dibuktikan secara empiris, dimana dalam konflik di Timur Tengah "Barat" umumnya berpihak kepada Israel. Fenomena tragedi *World Trade Centre* (WTC) tahun 2001 juga dianggap sebagai bukti akan kebenaran tesis tersebut.

Pembahasan

Pembahasan artikel ini menggunakan analisis dan penafsiran dalam skema metodologi kualitatif. Hal-hal itu meliputi beberapa langkah sebagai berikut: kategorisasi, analisis kausalitas, analisis perbandingan, dan deskripsi analitik.¹⁸ Sejumlah langkah di atas dipandang sudah cukup komprehensif untuk mengkaji dan menginterpretasi data-data yang terkumpul.

Merujuk pada konsep tiga dimensi pada bagian sebelumnya, bahwa dimensi realitas dari ideologi merefleksikan nilai-nilai suatu masyarakat, dengan sendiri keberadaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa memang melalui perenungan panjang dengan jalan menggali dan menelusuri nilai-nilai dasar dari masyarakat yang hidup di wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang dahulu dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Oleh

¹⁸ Moleong, *op.cit*, hlm. 193-207.

karena itu, aktualisasi nilai-nilai Pancasila logikanya mengembalikan masyarakat Indonesia kepada nilai-nilai dasarnya yang mungkin selama ini terlupakan karena hiruk pikuk modernisasi. Upaya ini dinilai dapat menjawab tantangan dinamika politik, ekonomi, dan kebudayaan yang berpotensi kepada Perang Proxy di Indonesia. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang perlu diaktualisasi agar menjadi referensi dari perilaku sosial masyarakat Indonesia baik di tingkat elit maupun massa. Jika ada kebijakan pemerintah, undang-undang, dan perilaku masyarakat, termasuk kelompok sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebenarnya bisa saja hal-hal tersebut ditolak atau harus diselaraskan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia seperti yang terkandung pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila punya posisi kuat (strategis) sebagai sumber dari segala hukum, dan nilai-nilai dasar di Indonesia. Hal yang perlu digarisbawahi bahwa ini sudah menjadi kesepakatan para pendiri negara. Jika ada pihak yang menentanginya berarti dia sudah mengkhianati pendiri negara yang telah berjuang untuk Indonesia merdeka.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dibidang politik sebagai jawaban terhadap Perang Proxy politik. Kalau mau konsisten, Indonesia seharusnya juga tidak melakukan sistem pemilu langsung karena sila keempat menyatakan bahwa demokrasi kita menganut sistem perwakilan. Tetapi tentu saja hal ini

tidak mutlak karena dimensi fleksibel menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk sebuah perubahan atau penyesuaian dengan dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian, Pancasila membuka ruang bagi tafsir politik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tinggal bangsa Indonesia mengkreasiannya sedemikian rupa yaitu mencari sistem pemilu yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat dewasa ini, tetapi juga tidak meninggalkan substansi semangat dari sila keempat tersebut.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dibidang ekonomi juga sebagai jawaban terhadap Perang Proxy ekonomi. Sebenarnya, sejak masuknya investasi asing IGGI (*Inter-governmental Group In Indonesia*) tahun 1967 di era Orde Baru, sampai dengan era Reformasi lebih condong menganut tatanan ekonomi Liberal-Kapitalistik. Hal ini terjadi karena pemerintahan Soeharto pada masa itu membutuhkan modal asing untuk menghidupkan perekonomian Indonesia yang rendah pada masa itu. Pihak pemodal hanya mau berinvestasi di Indonesia jika tatanan ekonominya bersifat liberal yaitu memberi kebebasan seluas-luasnya kepada investor dalam melakukan eksplorasi bisnis di Indonesia. Hal ini tidak terjadi di era Sukarno, karena beliau berpandangan dari pada kekayaan alam Indonesia dikeruk oleh orang asing, lebih baik sementara ditunda dulu sampai putra-putri Indonesia siap melakukannya sendiri, khususnya disektor eksplorasi tambang dan mineral.

Di era Reformasi, tatanan Liberal-Kapitalistik diteruskan dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi, karena ini adalah salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan. Semua presiden di era ini berlomba-lomba memuja pertumbuhan ekonomi, walaupun harus mengorbankan kepentingan lain misalnya isu lingkungan hidup. Di lain pihak, hal ini bisa dipahami karena pemerintah memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya yaitu sandang, pangan, papan, dan kesempatan kerja. Memang kondisinya dilematis antara cita-cita dan realitas ekonomi politik yang ada.

Namun demikian, hal ini bisa diatasi jika pemerintah mau membangun keseimbangan secara konsisten dan objektif antara kepentingan ekonomi dengan non-ekonomi dan tahan menghadapi tekanan kepentingan para aktor ekonomi dan politik dalam dan luar negeri yang demikian kuat pengaruhnya. Dunia saat ini dikuasai Kapitalisme global yang menancapkan pengaruhnya di negara-negara yang punya potensi besar di bidang ekonomi, Indonesia salah satu dari negara-negara tersebut. Tidak heran Indonesia juga menjadi salah satu sasaran mereka. Kekuatan kapitalisme global menanamkan modalnya di Indonesia dan bekerja sama dengan mitra-mitranya, yakni para pebisnis nasional. Indonesia menjadi pasar berbagai produk-produk industri besar dunia dan persaingan produk-produk atau persaingan bisnis ini juga bisa dipahami sebagai Perang Proxy dalam konteks ekonomi. Seperti

kita ketahui bahwa orientasi para pebisnis di Indonesia juga kepada berbagai merk dagang besar di dunia dan negara-negara besar. Sudah menjadi rahasia umum bahwaterjadi persaingan di berbagai produk barang dan jasa di pasar Indonesia. Walaupun sudah ada institusi yang mengawasi dunia usaha yaitu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), praktik-praktik curang masih sering kali ditemukan. Yang menjadi masalah adalah ketika para pebisnis ini ingin memenangkan persaingan dengan curang, misalnya masuk ke lingkaran kekuasaan atau memberi suap kepada pejabat negara dan menyebabkan kebijakan pemerintah menjadi bias pada kelompok kepentingan tertentu. Namun demikian, hal seperti ini sekarang tidak mudah dilakukan karena perilaku pejabat dan elit diawasi oleh media massa.

Jika ingin menata ekonomi Indonesia dari perspektif nilai-nilai Pancasila, tentu perlu beberapa langkah berani. Pertama, Pancasila memang tidak mengatur soal ekonomi secara rinci. Hanya sila kelima menyatakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini artinya Liberalisme-Kapitalisme di Indonesia perlu disesuaikan dengan isu keadilan sosial tersebut. Apalagi perkembangan Liberaillisme dan Kapitalisme telah mempromosikan budaya rakus dan hedonis yang begitu mendunia, maka secara tak langsung, disamping pengusaha, penguasa, juga ikut bertanggungjawab atas hal itu.¹⁹ Oleh karena itu, secara ekonomi,

¹⁹ Herbert Marcuse, *Perang Melawan Kapitalisme*

politik pemerintah Indonesia harus banyak terlibat dalam perkembangan budaya bisnis dan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Hal ini tidak bisa dibiarkan berjalan bebas tanpa arah seperti mekanisme liberal. Tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap ekonomi liberal belum cukup “matang.” Jangan sampai masyarakat kelas bawah memiliki tingkat konsumtif jauh di atas pendapatannya. Pendeknya, perlu pendampingan masyarakat oleh pemerintah melalui regulasi agar mampu bersikap rasional dalam perilaku ekonominya. Pemerintah tidak perlu ragu dan takut untuk memodifikasi mekanisme ekonomi pasar bebas agar selaras dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Lebih jauh, keberadaan bisnis menengah dan besar justru merugikan bisnis kecil. Lihat saja, *group supermarket* masuk ke pelosok-pelosok Jabodetabek, bahkan hampir di seluruh Indonesia. Hal ini tentu menghancurkan toko dan warung kecil milik rakyat karena tidak mampu bersaing secara liberal dengan konglomerasi bmodal besar tersebut. Seharusnya, setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus memperhatikan dimensi itu. Tentang formatnya, iklim bisnis berdimensi keadilan sosial seperti apa tentu butuh kajian tersendiri. Kedua, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa koperasi menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Bagaimana implementasinya,

Global, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.214.

tentu butuh kebijakan pemerintah yang mengaturnya. Yang pasti, tatanan ekonomi Indonesia tidak boleh dibiarkan begitu saja berkembang hanya mengikuti selera pemodal asing, tetapi juga perlu mengindahkan amanat Pancasila dan UUD 45. Jadi sekali lagi yang dibutuhkan adalah keberanian menata perekonomian dengan tetap memberi kesempatan kepada modal asing di Indonesia.

Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dibidang kebudayaan sebagai jawaban terhadap Perang Proxy Kebudayaan. Masyarakat Indonesia khususnya generasi muda saat ini, lebih menyukai budaya asing ketimbang kebudayaan Indonesia. Sekarang ini budaya populer dari Asia Timur, Eropa Barat, Amerika Serikat, Asia Selatan, sedang bersaing di Indonesia untuk memperebutkan pengaruhnya. Bahkan sejumlah stasiun TV swasta di Indonesia menjadi aktor lokal dari Perang Proxy karena secara khusus menjalin kerja sama dengan negara dimana kebudayaan tersebut berasal. Hal ini juga sebagai fenomena Perang Proxy di sektor kebudayaan populer. Sebaliknya, kebudayaan lokal dan nasional sudah kehilangan peminat. Kebudayaan Jawa seperti wayang kulit, wayang orang, ludruk, ketoprak seperti mati suri. Demikian kebudayaan Sunda seperti wayang golek, tari-tarian juga mengalami nasib yang sama. Kebudayaan Sumatera juga kehilangan peminat khususnya di antara kaum muda, seperti tari Serampang dua belas, tari piring, tari payung dan atraksi-atraksi

kebudayaan lainnya juga mengalami hal serupa. Pancasila tidak mengatur soal kebudayaan secara khususnya hanya saja sila pertama megatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemahaman manusia yang beradab adalah manusia yang berkebudayaan. Faktanya banyak masyarakat Indonesia disuguhi oleh produk-produk kebudayaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Misalnya tayangan TV dan Film yang memuat kekerasan, pornografi, atau nilai-nilai yang tidak sejalan dengan sila pertama dari Pancasila tersebut.

Sekarang era digital, media kebudayaan juga dituntut untuk menyesuaikan dengan hal tersebut. Ciri atau karakter masyarakat digital adalah TV, Film, aplikasi pada *handphone* dan sejenisnya, menjadi media informasi strategis. Dilain pihak, jika TV, film dan media sosialdibiarkan tumbuh bebas seperti sekarang ini (di era reformasi), atas nama kebebasan berekspresi, masyarakat akan mudah terbelah opini publiknya karena langkah provokasi dan mudah terpicu terjadinya konflik horisontal. Apalagi jika merujuk pada tradisi pasar bebas atau ekonomi liberal, tv swasta, produser, situs di media sosial hanya mementingkan keuntungan (rating siaran) tanpa memikirkan nasib kebudayaan nasional, lokal dan dimensi pendidikan masyarakat, kecuali TV publik yang masih menaruh perhatian pada hal itu.

Artinya, media sosial di Indonesia umumnya sudah kurang memperhatikan

dimensi tanggungjawab sosial walaupun tentu saja tidak semuanya demikian. Pemerintah seharusnya tidak boleh lambat meresponnya. Kementerian teknis terkait perlu lebih aktif mengatur soal arah perkembangan kebudayaan nasional. Konsep dimasa lalu, yaitu strategi kebudayaan nasional bisa menjadi inspirasi pihak terkait, walaupun tidak perlu persis seperti itu. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi medan Perang Proxy dari berbagai kebudayaan luar yang masuk karena kebudayaan adalah jati diri bangsa, sehingga perlu mendapat perhatian serius seperti halnya sektor pertumbuhan ekonomi ekonomi.

Kesimpulan

Salah satu tantangan masyarakat Indonesia dan pemerintah dewasa ini adalah Perang Proxy yang bisa berdampak kepada terjadinya ancaman disintegrasi bangsa dan runtuhnya NKRI. Berbagai Perang Proxy di Indonesia yaitu di bidang politik-keamanan, ekonomi, dan kebudayaan berpotensi menuju kearah itu. Walaupun demikian, ada sebagian kelompok sosial yang menilai kewaspadaan ini justru ditafsirkan sebagai kepanikan dan berlebihan. Hal ini adalah soal tafsir manusia yang dipengaruhi oleh variabel beragam kepentingan dan perspektifnya terhadap suatu fenomena.

Untuk menghadapi tantangan Perang Proxy tersebut di atas maka diperlukan upaya mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila ke sektor politik dan keamanan, ekonomi, dan kebudayaan.

Intinya perlu gerakan mengembalikan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara secara benar. Lebih dari itu, perlu upaya menjadikannya sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia di era reformasi yang peduli pada nilai-nilai kebebasan, keterbukaan, demokrasi, dan memperhatikan dimensi fleksibilitas dari Pancasila.

Bagi penegak hukum dan pihak terkait sudah seharusnya bekerja profesional, sehingga tidak perlu terpengaruh oleh opini publik dan tidak perlu juga khawatir dinilai tidak demokrasi. Yang perlu dipegang, prinsip bahwa siaga dan waspada selalu lebih baik dari pada “kecolongan.” Karena itu penguatan peran penegak hukum dan fungsi intelijen perlu dimaksimalkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Alfian. 1981. *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Jones, Howard, P. 1977. *Indonesia Possible Dream*. Singapura : Toppan Printing, Co, Ltd.
- Marcuse, Herbert. 2012. *Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siswanto. 2015. *Terobosan John F. Kennedy dalam Kemelut Irian Barat*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima

Jurnal

- Simantov, Yaacov Bar. 1984. “The Strategy of War by Proxy”. *Cooperation and Conflict*. No.XIX. New York: Middle East Institute, Columbia University and Department of International Relations. The Hebrew University of Jerusalem.

Website

- Dahm, Benhard, “Soekarno Yakin Pancasila dan NASAKOM Adalah Masa Depan Indonesia,” <http://www.dw.com/id/soekarno-yakin-pancasila-dan-nasakom-adalah-masa-depan-indonesia/a-19345349>, 16 Juni 2016, diakses pada 15 Maret 2017.
- Hendriyana, Artanti, “Waspada, Proxy War Menyerang Berbagai Aspek Kehidupan di Indonesia”, <http://www.unpad.ac.id/2016/03/waspada-proxy-war-menyerang-berbagai-aspek-kehidupan-di-indonesia/>, 7 Maret 2016, diakses pada 16 Maret 2017.
- Tempo, “Tegang di Natuna, Ini Senjata Luhut yang Bikin Cina Keder”, <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/21/118721073/tegang-di-natuna-ini-senjata-luhut-yang-bikin-cina-keder>, 21 November 2015, diakses pada 15 Maret 2017.
- Tempo, “Cina Akui Hak Indonesia atas Kepulauan Natuna,” <https://dunia.tempo.co/read/news/2015/11/21/118720925/cina-akui-hak-indonesia-atas-kepulauan-natuna>, 21 November 2015, diakses pada 15 Maret 2017.
- Zainal, Mega Purnama, “Tiga Tokoh Perumus Pancasila”, Universitas Abulyatama, 22 Agustus 2016, dalam <http://abulyatama.ac.id/?p=5220>, diakses pada 18 Januari 2017.

